



**LAPORAN MONITORING DAN
EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
PANGKALAN PSDKP BITUNG
TAHUN 2024**

Oleh : Tim PPID

Alamat : Jalan Tandurusa-Naemundung, Kota Bitung, Sulawesi Utara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada Pangkalan PSDKP Bitung Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian dan Kelautan, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good government) dengan harapan akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pangkalan PSDKP Bitung secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai Bentuk Pelayanan Kepada Masyarakat Pangkalan PSDKP Bitung menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik serta segala sesuatu yang berakibat pada informasi publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good government), yang secara optimal menerapkan good government di lingkungan instansinya sehingga meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga Negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

1.2 Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Tekhnis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim PPID Pangkalan PSDKP Bitung, Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

BAB II

LAPORAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia yang merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Komisi Informasi juga menyelenggarakan pemeringkatan keterbukaan informasi untuk seluruh instansi pemerintahan di Indonesia termasuk Pangkalan PSDKP Bitung yang selalu berupaya untuk meningkatkan nilai rating Keterbukaan Informasi.

1.2.1. Kebijakan yang diambil Pangkalan PSDKP Bitung

Layanan informasi publik merupakan bagian dari komitmen instansi dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan layanan informasi publik guna memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses, Yang bertujuan,

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan public
- Menjaga kualitas layanan informasi agar sesuai dengan standar yang berlaku

Berdasarkan prinsip layanan informasi Publik Pangkalan PSDKP Bitung terus meningkatkan pelayanan yang mencakup aspek,

- Transparansi, Informasi publik tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.
- Akuntabilitas, Setiap informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum.

- Cepat dan tepat, Pelayanan Informasi harus diberikan dengan cepat, tepat, dan tidak berbelit-belit.
- Keterjangkauan, Informasi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
- Keamanan dan Perlindungan data, informasi yang dikecualikan harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Jenis informasi yang disediakan mencakup,

- Informasi Berkala, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara rutin, seperti Laporan Kinerja dan anggaran.
- Informasi serta merta, informasi yang harus segera diumumkan terkait keadaan darurat atau kepentingan publik.
- Informasi setiap saat, Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat kapan saja sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- Informasi yang dikecualikan, Informasi yang tidak dapat diakses oleh publik karena menyangkut rahasia negara, perlindungan data pribadi, atau kepentingan hukum tertentu.

Adapun mekanisme permohonan informasi mencakup,

- Pengajuan permohonan informasi dapat berbagai saluran seperti situs web, email, layanan langsung atau surat resmi.
- Permohonan informasi diproses dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi ditolak, pemohon dapat mengajukan keberatan atau sengketa informasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam pengelolaan dan pengawasan Informasi publik, Pangkalan PSDKP Bitung Melaksanakan Langkah-langkah diantaranya,

- Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penanggungjawab utama dalam layanan informasi publik.

- Evaluasi dan peningkatan layanan informasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas pelayanan yang optimal.
- Laporan penyelenggaraan layanan informasi disusun dan dipublikasikan sebagai bagian dari akuntabilitas instansi kepada publik.

1.2.2. Rincian Pelayanan Informasi Publik

a. Ruang Lingkup Layanan

Layanan informasi publik mencakup pengelolaan, penyediaan, dan pendistribusian informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Jenis Informasi yang Disediakan

1. Informasi Berkala

- Laporan keuangan dan kinerja instansi.
- Rencana strategis dan program kerja.
- Informasi kebijakan dan peraturan terbaru.

2. Informasi Serta-Merta

- Informasi bencana alam atau keadaan darurat lainnya.
- Informasi terkait peringatan dini dan penanganan krisis.

3. Informasi Setiap Saat

- Informasi yang dapat diakses kapan saja berdasarkan permintaan masyarakat, seperti prosedur pelayanan publik, daftar pejabat, dan hasil kajian instansi.

4. Informasi yang Dikecualikan

- Informasi yang terkait dengan rahasia negara, perlindungan data pribadi, dan dokumen internal yang dapat membahayakan kepentingan publik jika dipublikasikan.

c. Mekanisme Permohonan Informasi

1. Cara Mengajukan Permohonan

- Melalui situs web resmi.
- Datang langsung ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- Mengirimkan surat resmi atau email ke alamat yang ditentukan.

2. Persyaratan Permohonan

- Mengisi formulir permohonan informasi.
- Melampirkan identitas diri (KTP/SIM/paspor).
- Menyebutkan informasi yang dibutuhkan dengan jelas.

3. Proses Penyelesaian Permohonan

- Penerimaan Permohonan: Petugas mencatat dan memverifikasi permohonan dalam waktu 1 hari kerja.
- Peninjauan dan Persetujuan: PPID meninjau ketersediaan informasi dan memastikan apakah informasi dapat diberikan dalam waktu 10 hari kerja.
- Pemberian Informasi: Jika permohonan diterima, informasi diberikan melalui media yang sesuai (hardcopy, softcopy, atau melalui portal digital).
- Penolakan Permohonan: Jika informasi termasuk dalam kategori yang dikecualikan, pemohon akan diberikan surat penolakan disertai alasan yang jelas.

d. Biaya Layanan

- Layanan informasi publik diberikan secara gratis.
- Jika pemohon membutuhkan salinan fisik (hardcopy), biaya cetak atau penggandaan akan ditanggung oleh pemohon sesuai dengan tarif yang berlaku.

e. Waktu Layanan

- Senin – Jumat: 08.00 – 16.00 WIB
- Hari libur dan akhir pekan: Tidak beroperasi

f. Pengaduan Layanan

Jika pemohon merasa tidak puas dengan layanan informasi yang diberikan, mereka dapat mengajukan pengaduan melalui:

- PPID utama instansi yang bersangkutan.
- Surat resmi atau email ke bagian pengaduan publik.
- Komisi Informasi sebagai pihak penyelesaian sengketa informasi

1.2.3. Kendala Eksternal dan Internal dalam penyampaian Informasi Publik

1. Kendala Internal

1. Kurangnya SDM yang Kompeten

- Tidak semua pegawai memiliki pemahaman yang cukup tentang keterbukaan informasi publik.
- Minimnya pelatihan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

2. Sistem Pengelolaan Informasi yang Belum Optimal

- Belum maksimalnya sistem digital yang terintegrasi untuk mengelola permintaan informasi.
- Data belum terorganisir dengan baik, sehingga sulit diakses atau ditemukan.

3. Kurangnya Anggaran untuk Layanan Informasi

- Anggaran terbatas untuk pengadaan sarana dan prasarana layanan informasi.
- Kurangnya anggaran dalam teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan informasi.

2. Kendala Eksternal

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

- Banyak masyarakat belum memahami hak mereka dalam memperoleh informasi publik.
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi transparansi informasi.

2. Penyebaran Hoaks dan Disinformasi

- Informasi resmi sering kali tersaingi oleh berita hoaks yang lebih cepat menyebar.
- Masyarakat sulit membedakan mana informasi yang valid dan tidak.

3. Keterbatasan Akses Teknologi di Daerah Terpencil

- Belum semua daerah memiliki akses internet yang memadai untuk memperoleh informasi secara daring.
- Infrastruktur komunikasi belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil.

1.2.4. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik

- a. Pelayanan yang berbasis aplikasi terus disosialisasikan dan ditingkatkan.
- b. Setiap tahun, Pangkalan PSDKP Bitung melakukan evaluasi layanan informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- c. Hasil evaluasi diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
- d. Meningkatkan Website Pelayanan dan Kegiatan Pangkalan PSDKP Bitung.
- e. Adapun Website PPID Pangkalan PSDKP Bitung terus diupdate dan Menyatu dengan Website PPID KKP.
- f. Tim PPID Pangkalan PSDKP Bitung akan melakukan perbaikan dan inovasi dalam penyampaian Informasi Publik.
- g. Tim PPID Pangkalan PSDKP Bitung akan meningkatkan Pelayanan dan Berita Informatif pada berbagai Media Sosial.

1.2.5 Informasi Keterbukaan Publik dari Website PPID Pangkalan PSDKP Bitung

The screenshot displays the website interface for PPID Pangkalan PSDKP Bitung. At the top, there is a scenic image of a coastline. Below it, five categories of public information are listed with icons and brief descriptions:

- Informasi Berkala**: Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
- Informasi Serta Merta**: Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara Serta Merta.
- Informasi Setiap Saat**: Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara Setiap Saat.
- Informasi Dikecualikan**: Pengecualian Informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi.
- Informasi Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa**: Kumpulan Laporan dan Regulasi yang tersedia.

The main content area is divided into several sections:

- Galeri**: A video titled "Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat" and a photo of a service counter labeled "Pelayanan".
- Informasi Terkini**: A list of recent news items, including "PSDKP Mengajar", "Konsolidasi Teknis", "Pendaftaran Permintaan Informasi", "Pembinaan Pokmaswas Mamuju", and "Bimtek Peningkatan Kompetensi Tekhnis".
- Agenda**: Upcoming events such as "Penataan Ruang PPID" and "Sosialisasi Layanan Aduan".
- Pengumuman**: Announcements like "Pelayanan Online" and "Ruang Pelayanan".
- Informasi Lainnya**: A link to additional information.
- Hubungi Kami**: Contact details for the office, including address, phone number, and email.

At the bottom, there is a footer with the copyright notice: "© Copyright 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia".

Gambar diatas adalah Informasi Keterbukaan Publik yang dapat di Akses melalui Website

<https://ppid.kkp.go.id/upt/pangkalan-psdkp-bitung/>

1.2.4 Website Informasi dan Pelayanan Pangkalan PSDKP Bitung



Gambar diatas adalah Informasi dan Pelayanan yang dapat di Akses melalui Website <https://sipelintas.com/>

1.2.5 Website Profil Pangkalan

Merupakan Web Kehumasan dan sosialisasi dan kegiatan Pangkalan PSDKP Bitung, memuat berbagai kegiatan, baik pengawasan dari Pangkalan PSDKP Bitung sampai pada Wilayah kerjanya.



OMAHUTIN

Program konservasi bambu laut

October 30, 2024



OMAHUTIN

PSDKP Mengajar, Pangkalan PSDKP Bitung

October 29, 2024



OMAHUTIN

Kegiatan Jiwa Korsa

October 28, 2024



Pengawasan Pemanfaatan ruang Laut

October 30, 2024



Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut

October 30, 2024



Kegiatan Pengawasan Wasrik, Labuan uki

October 30, 2024



Kegiatan pemeriksaan kapal perikanan

October 30, 2024



Pengawasan Kapal Perikanan

October 30, 2024



OPISATWIL

Pemeriksaan kapal perikanan, Bangkeplut

October 30, 2024

KENDARR

Pemeriksaan Kedatangan dan keberangkatan kapal

September 30, 2024

MAKASSAR

Pengambilan contoh uji terindikasi DF, Pangkep

September 30, 2024

GORUT

Pemeriksaan Awal Kedatangan kapal di Satwas Gorontalo Utara

September 30, 2024

KENDARR

Pemeriksaan keberangkatan kapal, banggai

August 26, 2024

MAMULU

Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan, Mamuju

August 26, 2024

MAKASSAR

Pemeriksaan Awal Kedatangan kapal di Wiker PSDKP Bulukumba

August 26, 2024

OPISATWIL

Pemeriksaan Awal Kedatangan Kapal

December 29, 2023

Dinas Dalam



Kegiatan Lomba 17 Agustus

August 28, 2024



Berita duka, Pangkalan

August 28, 2024



Giati Olahraga Pagi

July 23, 2024



Berita Duka Pangkalan

July 22, 2024



DINAS DALAM SATWAS DAN WILKES

Giat Kebersihan kantor Gorut

August 26, 2024

Giat Kebersihan kantor Gorontalo Utara dalam rangka 17 Agustus.



KAPAL PENGAWAS

Sosialisasi SKP

October 30, 2024

KAPAL PENGAWAS

Patroli Kapal Pengawas

October 1, 2024

KAPAL PENGAWAS

Duta PSDKP MENGAJAR

September 30, 2024

KAPAL PENGAWAS

Giat di Kapal Pengawas Hiu 05

September 30, 2024

KAPAL PENGAWAS

Giat Operasi Speed Boat URC Hiu Biru 05

July 30, 2024



KENDARI

Pencarian Nelayan hilang, Morowali

October 30, 2024

PERKEMBANGAN OPS SAR KECELAKAAN KAPAL SATU SATU ORG NELAYAN BELUM KEMBALI SAAT MEMANCIANG DI PERAIRAN DESA...

KENDARI

Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi, Banggai

October 30, 2024

Kegiatan Wilker PSDKP Luwuk Banggai pada hari jum'at tanggal 04 september 2024, berdasarkan Surat Tugas Nomor...



KENDARI

Pengawasan pemanfaatan ruang laut

September 30, 2024



KENDARI

Pemeriksaan Kedatangan dan keberangkatan kapal

September 30, 2024

SATWAS



MAKASSAR

PSDKP Mengajar, Makassar

October 30, 2024

kegiatan PSDKP Mengajar dilaksanakan oleh Satwas SDKP Makassar di SMKN 9 Makassar dalam rangka memperingati HUT ke 25 Kementerian Kelautan...



MAKASSAR

Seminar dan Upacara Seremonial Deployment Konstruksi Artificial Reef

October 30, 2024

kegiatan dalam rangka menghadiri undangan Seminar dan Upacara Seremonial Deployment Konstruksi Artificial Reef yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Kelautan dan...



GIAT INTERNAL

DINAS DALAM SATWAS DAN WILKES

Kegiatan Satwas SDKP Takalar

August 26, 2024



DINAS DALAM SATWAS DAN WILKES

Upacara memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 79 di PPN kwandang

August 26, 2024



DINAS DALAM SATWAS DAN WILKES

Giat Lomba 17 Agustus, Gorut

August 26, 2024



DINAS DALAM SATWAS DAN WILKES

Giat Kebersihan kantor Gorut

August 26, 2024



DINAS DALAM SATWAS DAN WILKES

Giat Kebersihan Bangkeplut

August 26, 2024



MAKASSAR

Berita duka

October 30, 2024



MAKASSAR

Undangan dari BPSPL Makassar

September 30, 2024

1.2.6 Website Pengawasan Ruang Laut

Merupakan Web yang memberikan informasi kepada masyarakat dan Pelaku usaha tentang Aturan, Larangan serta Hal Yang berkaitan dengan Pemanfaatan Ruang laut. Web ini juga berfungsi sebagai rekap Pengawasan yang sudah dan belum dilakukan selama periode satu tahun.

WASRULA
Sistem Pemantauan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut
Pangkalan PSDKP Bitung

Panduan Publik Panduan Pengawas

INFORMASI

- Wilayah Pengawasan**
Wilayah Pengawasan Ruang Laut Pangkalan PSDKP Bitung
Lebih Lanjut
- Perizinan**
Perizinan dan Prosedur Pengurusan Dokumen serta format pelaporan tahunan
Lebih Lanjut
- Jenis Pelanggaran**
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai peraturan/KKPRL
Lebih Lanjut
- Kumpulan Peraturan**
Kumpulan peraturan terkait Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang Laut
Lebih Lanjut

PELAYANAN ONLINE

Pelayanan Online Berupa Informasi Perizinan, Kesesuaian Dokumen KKPRL serta Interaktif komunikasi secara Online Maupun Media pengiriman Dokumen dan data yang dapat dilakukan dengan mengisi Form ataupun melakukan chat interactive dengan petugas pelayanan.

Layanan Konsultasi Form Pengaduan

PETA LOKASI PEMANFAATAN RUANG LAUT

- SULAWESI UTARA**
Wilayah Pengawasan Ruang Laut di Sulawesi Utara
- SULAWESI TENGAH**
Wilayah Pengawasan Ruang Laut di Sulawesi Tengah
- SULAWESI SELATAN**
Wilayah Pengawasan Ruang Laut di Sulawesi Selatan
- SULAWESI TENGGARA**
Wilayah Pengawasan Ruang Laut di Sulawesi Tenggara
- SULAWESI BARAT**
Wilayah Pengawasan Ruang Laut di Sulawesi Barat

PEMANTAUAN DAN DATA PENGAWASAN RUANG LAUT

- Daftar Perusahaan Kegiatan Berusaha
- Daftar Perusahaan Kegiatan Non Berusaha
- Daftar Perusahaan yang Telah Dilakukan Pengawasan
- Peta Lokasi Perusahaan Dengan Dokumen Persetujuan KKPRL
- Tindak Lanjut Perusahaan Dalam Pemantauan Kesesuaian KKPRL
- Laporan Tahunan Pengawasan KKPRL

Tentang Wasrula

[Wasrula \(Pengawasan Ruang Laut\)](#) adalah Sistem Pemantauan dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang laut Pangkalan PSDKP Bitung

Pengawasan SDK

Ruang Laut
Pesisir dan Pulau-pulau kecil
Pencemaran
Wilayah konservasi
Destructive fishing
Sumber daya ikan dilindungi

Link aplikasi

e-SEA
Sipolintas Pelayanan Online
Pangkalan PSDKP Bitung

Kontak dan Email

(0436) 2239156
stata.psdkpbtt@gmail.com

PENUTUPAN

Laporan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh Pangkalan PSDKP Bitung yang akan datang. Laporan ini kami buat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban kami sebagai bahan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pangkalan PSDKP Bitung.

Bitung, 14 Desember 2024
Kepala Pangkalan PSDKP Bitung



KURNIAWAN